

KEPEMIMPINAN MELAYU: ANALISIS TERHADAP NILAI DAN PRAKTIK

Daniatul Maghfiroh¹, Isma Fatonah², Mila Sebmi Angglepi³, Ellya Roza⁴
daniatulmaghfiroh554@gmail.com¹, ismafatonah2@gmail.com², milasebmil@gmail.com³,
ellya.roza@uin-suska.ac.id⁴

UIN Suska Riau

ABSTRAK

Kepemimpinan Melayu dipandang sebagai sebuah amanah yang berlandaskan pada perpaduan adat istiadat dan ajaran Islam. Pemimpin diibaratkan sebagai nahkoda yang mengarahkan rakyat menuju tujuan dengan selamat, sehingga dituntut memiliki kecerdasan, keteladanan, kejujuran, serta kemampuan mengoptimalkan potensi masyarakat. Nilai dasar kepemimpinan ini mencakup sifat amanah, siddiq, fathanah, dan tabligh, yang menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar urusan duniawi, tetapi juga amanah ukhrawi yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam praktik sosial, pemimpin Melayu berperan sebagai pengayom, teladan, dan pelindung rakyat dengan menjadikan adat dan syarak sebagai pedoman utama. Namun, arus modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan baru berupa melemahnya pemahaman adat, munculnya sikap pragmatis, dan berkurangnya wibawa pemimpin. Oleh sebab itu, revitalisasi kepemimpinan berbasis adat dan syarak sangat diperlukan agar tetap relevan, dipercaya, serta mampu menjaga identitas budaya Melayu di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Kepemimpinan Melayu, Adat, Syarak, Amanah, Nilai Tradisional.

ABSTRACT

Malay leadership is viewed as a mandate based on a combination of customs and Islamic teachings. Leaders are likened to captains who guide the people safely toward their destination, and are therefore required to possess intelligence, exemplary character, honesty, and the ability to optimize the potential of the community. The basic values of this leadership include trustworthiness, sincerity, wisdom, and communication, which emphasize that leadership is not merely a worldly matter, but also a spiritual mandate that will be accounted for before Allah SWT. In social practice, Malay leaders act as guardians, role models, and protectors of the people, using customs and Islamic law as their main guidelines. However, the currents of modernization and globalization present new challenges in the form of a weakening understanding of customs, the emergence of pragmatic attitudes, and a decline in the authority of leaders. Therefore, the revitalization of leadership based on customs and syarak is essential in order to remain relevant, trusted, and capable of preserving the Malay cultural identity amid changing times.

Keywords: Malay Leadership, Customs, Syarak, Trustworthiness, Traditional Values.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan Melayu berakar pada tradisi panjang yang bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, para Sahabat, serta Khulafa al-Rasyidin. Nilai-nilai utama seperti musyawarah, tenggang rasa, keadilan, dan kebijaksanaan sejak lama dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial maupun politik masyarakat Melayu. Namun, dalam praktik modern sering muncul persoalan ketika sebagian pemimpin menggunakan kekuasaan secara sepihak, kurang menghargai musyawarah, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini menimbulkan kritik karena dipandang bertentangan dengan adat dan syarak yang menjadi dasar budaya Melayu. Dampaknya terlihat dari melemahnya kepercayaan rakyat kepada pemimpin, munculnya konflik sosial, hingga kerusakan tatanan kehidupan berbangsa (Ellya Roza, dkk: 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti realitas kepemimpinan Melayu

dengan menekankan keterkaitannya pada adat dan syarak yang telah menjadi dasar kehidupan masyarakat sejak lama. Kajian tersebut umumnya menilai bahwa ketika kekuasaan digunakan secara menyimpang dari prinsip musyawarah, tenggang rasa, dan keadilan, maka hal itu dianggap sebagai pengabaian terhadap warisan nilai budaya Melayu. Beberapa studi juga menggaris bawahi bahwa gejala sosial seperti perselisihan di tengah masyarakat, rapuhnya kepercayaan terhadap pemimpin, hingga kerusakan tatanan sosial merupakan konsekuensi langsung dari praktik kepemimpinan yang tidak lagi berpijak pada tradisi. Sementara itu, penelitian lain menyoroti polemik antara nilai kepemimpinan tradisional dengan praktik kontemporer yang cenderung pragmatis dan politis. Berbagai temuan ini pada dasarnya saling melengkapi dalam memahami kepemimpinan Melayu sebagai sebuah sistem nilai yang tidak statis, melainkan senantiasa diuji dan dipengaruhi oleh realitas sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang.

Berdasarkan kajian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Melayu dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Fokus penelitian tidak hanya meninjau sejauh mana adat dan syarak masih menjadi pedoman dalam kepemimpinan, tetapi juga menelaah polemik yang timbul ketika nilai tradisional berhadapan dengan praktik kontemporer yang cenderung pragmatis. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi gejala sosial yang muncul akibat pergeseran pola kepemimpinan, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat, perselisihan, maupun kerentanan terhadap perubahan budaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode *library research*, yaitu menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen adat, dan karya ilmiah lain yang relevan. Melalui pendekatan kepastakaan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kesinambungan dan perubahan dalam kepemimpinan Melayu, serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi pelestarian nilai budaya di tengah tantangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya Sari & Sarmendri: 2020). Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepastakaan. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen, laporan penelitian, serta sumber ilmiah lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hasil penelitian kepastakaan ini menunjukkan bahwa merupakan metode yang menekankan pada pengumpulan informasi mendalam dari berbagai literature seperti; buku, catatan, majalah, jurnal, dan dokumen-dokumen pendukung yang tidak memerlukan riset lapangan. Peneliti kepastakaan merupakan metode kajian teks menjadi unsur utamanya. Langkah-langkah penelitian kepastakaan dimulai dari (a) pemilihan topik penelitian; (b) Eksplorasi Informasi dan Kelayakan Topik (c) Menentukan Fokus Penelitian; (d) Pengumpulan Sumber Data (Primer dan Sekunder); (e) Analisis Data dan Sumber Referensi; (f) Membuat dan Mengolah Catatan Penelitian; (g) Penyusunan Laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kepemimpinan melayu

Pemimpin sering diibaratkan sebagai seorang nahkoda yang bertugas mengarahkan kapalnya agar tiba di tujuan dengan selamat. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin dituntut memiliki pemahaman yang luas, sikap keteladanan, serta kemampuan mengatur, mengarahkan, memberdayakan, dan mengoptimalkan potensi setiap anggotanya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Dengan demikian, seorang pemimpin tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga membina anggota agar kompetensinya meningkat, menjaga moral, serta tampil sebagai teladan yang dapat dipercaya. Suku Melayu sendiri merupakan bagian dari rumpun Austronesia yang tersebar luas di kawasan Asia Tenggara Maritim, khususnya di pesisir timur Sumatra, Semenanjung Malaya, sebagian Kalimantan, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Persebaran ini kemudian dikenal dengan istilah dunia Melayu, yang dalam perkembangannya menampilkan keragaman bahasa, tradisi, kesenian, serta kehidupan sosial akibat proses interaksi, asimilasi, dan akulturasi dengan berbagai etnis setempat.

Dalam tradisi kepemimpinan Melayu, nilai budaya dan ajaran agama memiliki kedudukan penting sebagai fondasi moral dan etika seorang pemimpin. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, tenggang rasa, keadilan, dan kebijaksanaan tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial. Pemimpin tidak sekadar diposisikan sebagai pengatur roda pemerintahan, melainkan juga sebagai figur teladan yang mengayomi masyarakat dan memastikan keseimbangan antara adat serta syarak. Namun, arus modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru bagi praktik kepemimpinan tersebut. Tidak jarang sebagian pemimpin lebih menekankan kepentingan pribadi maupun kelompok dibandingkan nilai-nilai tradisional, sehingga menimbulkan polemik dalam masyarakat. Gejala yang tampak antara lain melemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpin, meningkatnya konflik internal, serta terkikisnya kohesi budaya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Melayu untuk terus mengkaji, memperkuat, dan melestarikan nilai kepemimpinan tradisional agar tetap relevan dengan dinamika kontemporer tanpa kehilangan akar budaya.

Dalam pandangan masyarakat Melayu, kepemimpinan dipahami bukan sekadar posisi atau jabatan, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Amanah tersebut diyakini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga seorang pemimpin tidak hanya berurusan dengan manusia, tetapi juga dengan aspek spiritual. Dalam Islam, harta benda, keturunan, maupun status sosial memang sering dijadikan ukuran harga diri seseorang, namun masyarakat Melayu menempatkan agama sebagai standar yang lebih tinggi dan paling hakiki. Oleh karena itu, kepemimpinan yang ideal tidak hanya mengedepankan kepentingan duniawi, melainkan juga menekankan nilai-nilai religius sebagai dasar setiap tindakan. Seorang pemimpin dituntut mampu menyeimbangkan hubungan horizontal dengan masyarakatnya sekaligus menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan. Dengan demikian, tanggung jawab kepemimpinan di dalam tradisi Melayu bersifat ganda: formal di hadapan manusia dan moral di hadapan Allah di akhirat kelak (Fera Andriani, dkk: 2013).

Nilai-nilai yang menjadi dasar dalam kepemimpinan Melayu

Kepemimpinan dalam tradisi Melayu lahir dari perpaduan antara adat istiadat dan ajaran Islam yang menekankan nilai moral serta tanggung jawab sosial maupun spiritual. Salah satu prinsip utama adalah amanah, yaitu kesanggupan seorang pemimpin menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya sekaligus melaksanakan tanggung jawab dengan

penuh kesungguhan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Selain itu, pemimpin dituntut memiliki sifat *siddiq* atau jujur, sehingga ucapan, tindakan, dan sikapnya dapat dipercaya serta dijadikan teladan bagi rakyat. Nilai berikutnya adalah *fathanah*, yang menekankan pentingnya kecerdasan, ketajaman berpikir, dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan serta mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Tidak kalah penting adalah sifat *tabligh*, yakni kemampuan menyampaikan pesan, kebijakan, dan arahan secara jelas, benar, dan mudah dipahami masyarakat. Keempat nilai tersebut menjadi fondasi kepemimpinan Melayu yang menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya urusan duniawi, melainkan juga amanah ukhrawi yang akan dipertanggungjawabkan kelak (Violeta Inayah Pama, dkk: 2024). Seorang pemimpin juga harus mempunyai moralitas yang baik, antara nya memiliki sifat Ikhlas, tidak boleh terikat oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi, lemah lembut adil, murah hati, dan bijaksana (M. Ied Al Munir & Muslim H. Ja'far: 2013).

Dalam praktik kehidupan masyarakat, penerapan nilai-nilai dasar kepemimpinan Melayu tercermin dalam hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai pengayom, pelindung, dan teladan yang menjaga keharmonisan sosial. Adat dan syarak dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalankan roda pemerintahan maupun mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul tantangan baru yang seringkali menguji konsistensi pemimpin dalam memegang nilai-nilai tersebut. Arus globalisasi, modernisasi, serta kepentingan pragmatis kerap membuat sebagian pemimpin terjebak pada orientasi kekuasaan dan kepentingan kelompok. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan rakyat, menimbulkan konflik internal, dan mengganggu stabilitas budaya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat kembali pemahaman serta pengamalan nilai kepemimpinan Melayu agar tetap relevan dengan konteks kontemporer, sekaligus menjaga kesinambungan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Praktik kepemimpinan Melayu diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam konteks adat maupun syarak

Kepemimpinan Melayu dalam kehidupan sosial masyarakat berpijak pada perpaduan adat dan syarak yang saling melengkapi. Sosok pemimpin adat, atau *niniok mamak*, dipandang sebagai figur pengayom, penuntun, sekaligus pelindung bagi anak kemenakan. Ia digambarkan layaknya “kayu rimbun tempat berteduh” karena memberikan rasa aman, menjadi teladan, serta menjaga keseimbangan sosial. Prinsip dasar yang melandasi sistem ini adalah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, sehingga seorang pemimpin dituntut memiliki sifat *siddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathonah* sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Proses pergantian kepemimpinan dilakukan melalui musyawarah keluarga besar, anak kemenakan, dan *bundo kanduang* hingga tercapai mufakat, sehingga legitimasi sosial benar-benar terjaga. Meski demikian, pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan baru, seperti melemahnya pemahaman adat, menguatnya sikap individualistis, serta menurunnya wibawa pemimpin adat di mata generasi muda. Karena itu, memperkuat kembali nilai adat dan syarak menjadi kunci untuk mempertahankan eksistensi kepemimpinan Melayu (Desi Apriani: 2017).

Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan Melayu tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kehidupan adat, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga identitas budaya dan kestabilan sosial masyarakat. Pemimpin adat dituntut untuk menanamkan nilai moral, memperkuat solidaritas, serta meneguhkan rasa kebersamaan di tengah anggota masyarakat yang kian beragam. Kehadirannya menjadi jembatan yang menghubungkan generasi tua dengan generasi muda, sekaligus memastikan bahwa tradisi tidak hilang di tengah derasnya arus globalisasi. Namun, perubahan zaman menuntut pemimpin Melayu

beradaptasi dengan realitas kontemporer tanpa kehilangan pijakan pada adat dan syarak. Karena itu, pemimpin tidak hanya perlu memahami warisan adat, tetapi juga harus memiliki kapasitas mengelola persoalan sosial modern seperti konflik kepentingan, degradasi lingkungan, hingga penetrasi budaya luar. Revitalisasi peran kepemimpinan adat berbasis nilai Islam dan tradisi Melayu menjadi penting agar kepemimpinan tetap relevan, terpercaya, serta mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan kemajuan dan pelestarian budaya.

KESIMPULAN

Kepemimpinan Melayu pada hakikatnya dipandang sebagai sebuah amanah yang tidak hanya berhubungan dengan tanggung jawab sosial, tetapi juga bernilai spiritual karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pemimpin Melayu ideal diibaratkan sebagai nahkoda yang menuntun rakyat menuju keselamatan dengan penuh keteladanan, kecerdasan, dan keikhlasan. Fondasi kepemimpinan ini dibangun dari perpaduan adat dan syarak, dengan nilai utama berupa amanah, siddiq, fathonah, dan tabligh, yang diperkuat oleh sikap ikhlas, adil, murah hati, dan bijaksana. Dalam praktik sosial, pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung, pembina moral, dan teladan yang menjaga keharmonisan masyarakat. Namun, globalisasi dan modernisasi membawa tantangan serius, seperti melemahnya nilai adat, munculnya sikap pragmatis, serta berkurangnya wibawa pemimpin di mata generasi muda. Oleh sebab itu, kepemimpinan Melayu perlu terus direvitalisasi agar tetap relevan, dipercaya, serta mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan zaman dengan kelestarian budaya dan nilai religius yang menjadi jati dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munir, M. Ied dan Muslim H. Ja'far, "Etika Kepemimpinan dalam Seloko Adat Melayu Jambi", jurnal penelitian sosial keagamaan, Vol. 28, No. 2, (2013).
- Ambarwati, Puji, dkk., "Pengertian Pemimpin, Manajer, Kepemimpinan, Peran dan Fungsi Kepemimpinan Serta Kepemimpinan yang Efektif dalam Lembaga Pendidikan", jurnal ilmiah ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 11, (2024).
- Andriani, Fera, dkk., "Karakter Pemimpin Melayu Dalam Pemimpin Ungkapan Melayu Karya Tenas Effendy", jurnal online mahasiswa keguruan dan ilmu Pendidikan fakultas universitas Riau Vol. 3, No. 2, (2016).
- Apriani, Desi, "Mengoptimalkan Peran Pemangku Adat Dalam Mengembalikan Budaya Cinta Lingkungan Dengan Melaksanakan Suksesi Kepemimpinan Adat Yang Sesuai Dengan Tuntunan (Kajian Terhadap Pelaksanaan Sistem Suksesi Kepemimpinan Pada Masyarakat Adat Kampar)", Universitas Islam Riau Repositori <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/2858>.
- Juswandi, "Pemimpin Dalam Masyarakat Melayu", jurnal Pustaka budaya, Vol. 1, No. 2, (2014).
- Milya Sari & Sarmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6 No. 1, (2020).
- Pama, Violeta Inayah, dkk., "Jati Diri dan Sistem Kepemimpinan Melayu", jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 2, (2024).
- Roza, Ellya, dkk., "Membaca Kepemimpinan Melayu Nusantara", jurnal Nusantara Vol. 18 No.2, (2022).